

**MEKANISME VALIDASI SURAT SETORAN PAJAK DAERAH
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH KABUPATEN GIANYAR**



Oleh

I Dewa Ayu Widyari Sumadhi

NIM 1915713103

PROGRAM STUDI D3 ADMINISTRASI BISNIS

JURUSAN ADMINISTRASI NIAGA

POLITEKNIK NEGERI BALI

BADUNG

2022

**MEKANISME VALIDASI SURAT SETORAN PAJAK DAERAH
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH KABUPATEN GIANYAR**



POLITEKNIK NEGERI BALI

Oleh

I Dewa Ayu Widyari Sumadhi

NIM 1915713103

PROGRAM STUDI D3 ADMINISTRASI BISNIS

JURUSAN ADMINISTRASI NIAGA

POLITEKNIK NEGERI BALI

BADUNG

2022

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : I Dewa Ayu Widyari Sumadhi
NIM : 1915713103
Jurusan : Administrasi Niaga

Dengan ini menyatakan bahwa naskah Tugas Akhir saya dengan judul: **"Mekanisme Validasi Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Gianyar"**

Adalah memang benar asli karya saya. Dengan ini saya juga menyatakan bahwa dalam naskah Tugas Akhir ini tidak terdapat karya orang lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar di suatu perguruan tinggi, dan atau sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang tertulis diacu dalam naskah Tugas Akhir ini dan disebutkan pada daftar pustaka.

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan menerima sanksi akademis dalam bentuk apapun.

Badung, 19 Juli 2022
Yang menyatakan



I Dewa Ayu Widyari Sumadhi
NIM 1915713103

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

1. Judul Tugas Akhir :

Mekanisme Validasi Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Gianyar

2. Penulis

a. Nama : I Dewa Ayu Widyari Sumadhi

b. NIM : 1915713103

3. Jurusan : Administrasi Niaga

4. Program Studi : D3 Administrasi Bisnis



Badung, 22 Agustus 2022

JURUSAN ADMINISTRASI NIAGA

Menyetujui

Pembimbing I,

Pembimbing II,

POLITEKNIK NEGERI BALI

Made Ayu Jayanti Prita Utami, S.S.T.Ak.,M.Si.
NIP. 199206132019032023

I Wayan Siwantara, SE.,MM
NIP. 196503071992031002

LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR

MEKANISME VALIDASI SURAT SETORAN PAJAK DAERAH BEA
PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN PADA BADAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN
GIANYAR

Oleh:

I DEWA AYU WIDYARI SUMADHI

1915713103

Disahkan:

Ketua Penguji



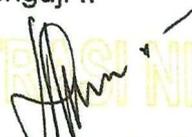
I Wayan Siwantara, SE., MM
NIP. 196503071992031

Penguji I



Ni Ketut Suciani, SS., M.Pd
NIP. 197004221998022002

Penguji II



I Ketut Muderana, SE., M.Si
NIP. 196503071992031

Mengetahui,
Jurusan Administrasi Niaga



Dr. I Ketut Santra, M.Si.
NIP. 196710211992031002

Badung, 22 Agustus 2022
Diketahui Oleh,
Program Studi D3 Administrasi Bisnis
Ketua,



I Made Widiantera, S.Psi., M.Si
NIP. 1974902182003121002

MEKANISME VALIDASI SURAT SETORAN PAJAK DAERAH BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN GIANYAR

ABSTRAK

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan atau yang disingkat dengan BPHTB adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan. Pemungutan BPHTB menggunakan *self assesment system*, yaitu wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung serta membayar sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) dan melaporkannya tanpa berdasarkan kepada adanya surat ketetapan pajak. Terkait hal itu penting pengetahuan wajib pajak terhadap mekanisme validasi Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan untuk menghindari kesalah jumlah yang harus dibayar dan dapat mengakibatkan wajib pajak terkena sanksi administrasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme validasi SSPD BPHTB pada BPKAD Kabupaten Gianyar, kendala-kendala yang dihadapi dalam proses validasi SSPD BPHTB, serta solusi dari kendala yang dihadapi dalam proses validasi SSPD BPHTB.

Metode penelitian ini menggunakan analisa deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder yang diperoleh melalui teknik observasi, wawancara, dan juga studi dokumen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme validasi SSPD BPHTB dimulai dengan melengkapi dokumen yang diperlukan, lalu membawa ke Kantor BPKAD Kabupaten Gianyar untuk proses validasi oleh kepala badan. Kendala yang dihadapi dalam proses validasi yaitu masih banyak masyarakat yang kurang paham tentang BPHTB. Solusi dari kendala tersebut ialah memberikan sosialisasi kepada masyarakat luas tentang BPHTB.

Kata kunci: *mekanisme, validasi, SSPD, BPHTB*

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan pada bab IV mengenai mekanisme validasi Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan pada kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Gianyar maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Mekanisme Validasi Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) pada BPKAD Kabupaten Gianyar:
 - a. Melengkapi berkas yang diperlukan
 - b. Membawa ke bagian pelayanan untuk registrasi berkas
 - c. Penelitian lapangan dan perhitungan berkas validasi oleh bagian penetapan
 - d. Pencetakan berita acara perhitungan oleh bagianpenetapan
 - e. Ditanda tangani oleh kepala badan untuk divalidas

- f. Wajib pajak melakukan pembayaran pada loket bank BPD dengan menyerahkan lembar SSPD yang telah divalidasi.
2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah dalam proses validasi SSPD BPHTB yaitu:
 - a. Kurangnya informasi, komunikasi, dan sosialisasi tentang perpajakan daerah terutama BPHTB kepada masyarakat, sehingga mengakibatkan wajib pajak umumnya kurang mengetahui secara pasti kewajiban perpajakan sehingga sangat berpengaruh besar terhadap besarnya penerimaan pajak BPHTB.
 - b. Masih banyak masyarakat yang tidak taat dalam membayar pajak BPHTB namun tidak ada tindakan dan sanksi yang tegas dan hukum yang ada sulit dilaksanakan untuk menindak kejahatan perpajakan.
 - c. Pelayanan ataupun prosedur administrasi perpajakan daerah yang kurang efektif menyebabkan masyarakat pembayar pajak BPHTB merasa kesulitan dalam mengurus pembayaran pajak BPHTB, sehingga masyarakat tidak patuh dalam membayar pajak BPHTB.
 3. Solusi dari kendala-kendala yang terjadi dalam proses validasi SSPD BPHTB di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gianyar yaitu:
 - a. Diadakan penyuluhan atau pemberitahuan kepada masyarakat tentang manfaat membayar pajak BPHTB melalui media sosial

yang dapat dengan mudah dijangkau oleh masyarakat dari berbagai kalangan

- b. Pemerintah Daerah perlu menelusuri dan mendata masyarakat yang tidak membayar pajak.
- c. Pemerintah Daerah perlu melakukan penyederhanaan prosedur administrasi serta menyajikan mekanisme berupa infografis untuk memberikan kemudahan masyarakat dalam memahami mekanisme validasi BPHTB, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan kepada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gianyar berdasarkan hasil analisa dan pembahasan Mekanisme Validasi Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan pada Kantor Badan Pengelolaan Kuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gianyar yaitu

1. Sebaiknya Kantor BPKAD Kabupaten Gianyar melakukan sosialisasi secara rutin kepada masyarakat tentang BPHTB dan juga mekanisme validasi SSPD BPHTB agar dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang BPHTB dan dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah dari pembayaran BPHTB.
2. Kantor BPKAD Kabupaten Gianyar sebaiknya melakukan inovasi dengan pembuatan infografis atau diagram proses validasi SSPD BPHTB agar mudah dipahami oleh masyarakat.

3. Kantor BPKAD Kabupaten Gianyar sebaiknya menambahkan jumlah tenaga dalam proses penelitian perhitungan berkas agar proses penyelesaian berkas validasi dapat berjalan dengan waktu yang efektif dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

- Christia, A. M., & Ispriyarso, B. (2019). DESENTRALISASI FISKAL DAN OTONOMI DAERAH Di INDONESIA. *Law Reform*, 15(1), 149. <https://doi.org/10.14710/lr.v15i1.23360>
- Damanik, C. H., Sabijono, H., & Pontoh, W. (2018). Analisis Prosedur Pemungutan Dan Kontribusi Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Bitung. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 13(04), 205–215. <https://doi.org/10.32400/gc.13.03.20103.2018>
- Gammahendra, F., Hamid, D., & Riza, M. F. (2014). Pengaruh Struktur Organisasi terhadap Efektivitas Organisasi. *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, 7(2), 1–10.
- Gianyar, B. K. (2021). Struktur Organisasi. Retrieved from Situs Resmi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gianyar: <https://bpkad.gianyarkab.go.id/profil/172/Struktur-Organisasi>. Diakses 1 Mei 2022
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Katili, A. (2021). *Perpajakan Teori dan Praktik*. Widina Bhakti Persada.
- Pradnyana, I., & Prena, P. (2019). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, E-Billing Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Pratama Denpasar Timur. *Wacana Ekonomi (Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Akuntansi)*, 18(1), 56–65. https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/wacana_ekonomi[http://dx.doi.org/10.22225/we.18.1.993.56-65](https://doi.org/10.22225/we.18.1.993.56-65)
- Priantara, D. (2013). *Perpajakan Indonesia (Pembahasan Lengkap &*

- Terkini CD Praktikum Edisi 2 Revisi*. Penerbit Mitra Wacana Media.
- Satori, D., & Komariah, A. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Siyoto, S., & Sodik, M. A. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Literasi Media Publishing.
- Sugiyono, P. D. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono, 2015, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sulistyorini, D. (2019). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Study Empiris di KPP Pratama Cikarang Selatan). *Accounthink : Journal of Accounting and Finance*, 4(2), 732–745. <https://doi.org/10.35706/acc.v4i2.2202>
- Yuhana, A. N. (2019). *Optimalisasi Peran Guru Pendidikan Agama Islam sebagai Konselor dalam Mengatasi Masalah Belajar Siswa*. 7(1).